



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 9 Januari 2023/Periodik - 2022)

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : PEMERINTAH KABUPATEN JENEPONTO  
**UNIT KERJA** : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : H. M. NASUHANG
2. Jabatan : KEPALA SATUAN
3. NHK : 750639

**II. DATA HARTA**

**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 1.020.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 2000 m2/260 m2 di KAB / KOTA JENEPONTO, WARISAN Rp. 760.000.000
2. Tanah Seluas 10000 m2 di KAB / KOTA JENEPONTO, WARISAN Rp. 260.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN** Rp. 117.000.000

1. MOBIL, TOYOTA AGYA Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000
2. MOTOR, HONDA PCS Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 17.000.000

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA** Rp. 46.500.000

**D. SURAT BERHARGA** Rp. ----

**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 3.943.789

**F. HARTA LAINNYA** Rp. ----

**Sub Total** Rp. 1.187.443.789

**III. HUTANG** Rp. 20.080.000

**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. 1.167.363.789

**Catatan:**

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-



Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.